

REFORMASI BIROKRASI MENUJU INDONESIA BARU, BERSIH DAN BERMARTABAT

Data Wardana dan Geovani Meiwanda

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Perubahan pola Pemerintahan di Indonesia seiring dengan reformasi birokrasi, perubahan diperlukan karena situasi pemerintahan terus mengalami pergeseran, sistem yang lama tentu tidak cocok lagi jika diterapkan pada era pemerintahan Indonesia saat ini. Kepentingan dan nilai publik menjadi fokus dalam artikel ini, upaya merubah birokrasi pemerintahan di Indonesia kearah yang lebih baik mengutamakan kepentingan masyarakat, sebagai pihak yang dilayani memerlukan proses yang panjang, reformasi birokrasi tidak hanya menitikberatkan pada gerak pemerintah aja, seluruh komponen masyarakat dans wasta juga dapat mendukung reformasi birokrasi ini sehingga *effective governance* akan cepat tercapai,

Abstract

Changes in government patterns in Indonesia along with bureaucratic reforms, changes are needed because the governance situation contineus to shift, the old system would not fit anymore if applied in the era of Indonesia government now. Consideration and public value are the focus of this article, efforts to change the goverment bureaucracy in Indonesia to better prioritize the interest of society, would require a long process, bureucratic reform not only focusing on government action, all of the component from society and private should supported bureucratic reform so the effeitive governance will be quickly achieved.

A. PENDAHULUAN

Kehadiran birokrasi dalam mengatur sendi-sendi kehidupan warga negara Indonesia telah mengalami proses yang panjang dalam perjalanan bangsa. Dimulai dari masa kerajaan yang menitikberatkan kedaulatan berada ditangan raja dan dilakukan sepenuhnya oleh raja, keluarga dan petinggi kerajaan. Warna birokrasi pada masa itu menjadi sangat otonom, totaliter dan mencengkeram warga yang ada pada masa tersebut. Setelah runtuhnya masa kerajaan, birokrasi di Indonesia diganti dengan masa penjajahan. Birokrasi modern yang dikenal oleh penjajah VOC dan Belanda bukan untuk tegaknya kedaulatan rakyat, namun birokrasi pada masa ini bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Birokrasi zaman penjajahan ini berorientasi kepada atasan, diwarnai dengan pro kekuasaan, menciptakan kolusi dan nepotisme. Setelah masa penjajahan berlalu, dilanjutkan pada masa birokrasi orde baru. Pada masa orde baru, birokrasi dicirikan dengan dominasi dari institusi pemerintah pusat atas pemerintah daerah dan dominasi Partai Golkar sebagai institusi politik yang mengakar di birokrasi. Birokrasi orde baru ditandai dengan birokrasi yang amat loyal kepada pemerintah atas, birokrasi yang rumit, dan tidak pro terhadap publik karna sikap yang tidak rasional para birokrat dalam melayani kepentingan publik¹.

Ketiga periode ini telah digambarkan bahwasanya birokrasi yang ada tidaklah netral. Posisi birokrat yang selalu identik dengan dengan pro kepada penguasa, pro kepada kekuatan politik tertentu dan selalu dapat dipolitisasi untuk mendukung kepentingan politik tertentu, hal ini persis pada gambaran birokrasi klasik ala Weberian.

Posisi birokrasi sebagai pelayan rakyat, haruslah menciptakan suatu sistem pelayanan publik yang lebih memuaskan dan melahirkan kebijakan publik yang rasional dan demokratis. Profesionalisme birokrasi tersebut menggambarkan bahwa tugas utama mereka untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat serta dapat menjalankan tugasnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari suatu negara. Secara konsep, menurut Blau (1963) birokrasi adalah organisasi yang ditunjukkan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi yang menurut Sayre memiliki ciri-ciri: Spesialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas, badan perundang-undangan, sistem pelaporan dan personel dengan keterampilan dan peranan khusus-khusus². Sedangkan menurut Mill (dalam Dwiyanto, 2009 : hal 228) mengungkapkan bahwa pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dan arti dari birokrasi. Menurut Peter Al Blau &

¹Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gava Media (hal : 224-227)

²Poltak Sinambela, Lijan. 2011. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara (hal : 70)

Charles H. Page dalam Sinambela, Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Secara umum birokrasi diartikan sebagai suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang bertugas melakukan pelayanan umum (*public service*) serta dilaksanakan dengan sepenuhnya (*secara sense of belonging dan sense of responsibility*). reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, sistematis dan komprehensif, yang ditujukan untuk mendesain ulang birokrasi yang berada dilindungan pemerintah ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini, atau yang sejalan dengan harapan, nilai, keinginan dari lingkungan sosial dan politik, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu birokrasi yang bersih, bebas KKN, profesional, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel sehingga birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik dengan prima.

Namun, sejak runtuhnya pemerintahan orde baru. Sistem birokrasi yang ada di Indonesia yang awalnya mendapatkan angin segar atas perubahan birokrasi dalam tatanan pemerintahan pada saat reformasi politik tahun 1998 yang berimbas terhadap reformasi di bidang administrasi publik. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi *gelombang pertama* (GDRB, 2010: 1). Reformasi gelombang pertama ini belum membawa hasil terutama terhadap perubahan di bidang birokrasi, karena penyakit birokrasi yang dikenal dengan istilah *bureaupathology* masih menjangkiti birokrasi di Indonesia seperti bersifat kaku, hierarkis, berbelit-belit, kolusi, korupsi dan nepotisme (yang selanjutnya disingkat KKN), tidak efisien & efektif dan biaya mahal (*high cost*)³. Hal ini terbukti selama Indonesia merdeka tetapi pencapaian kinerja aparat birokrasi pemerintahan yang produktif, efisien, efektif dan bersih dari KKN belum juga tampak. Hal ini dapat dilihat atas beberapa permasalahan yang muncul menghiasi wajah birokrasi Indonesia tentang tersandungnya kasus aparat pemerintah.

³ Hanafie, Haniah. "Strategi Reformasi Birokrasi". Jurnal Fisip UIN Jakarta (Tidak diterbitkan)

Tabell
Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2016

Skor (2015/2016)	Peringkat Regional (2015/2016)	Peringkat Global (2015/2016)	Negara
85/84	2/2	8/7	Singapore (Skor Turun, Peringkat Naik)
*/58	*/ 8	*/41	Brunei Malaysia (Skor Turun, Peringkat Turun)
50/49	9/ 10	54/55	Indonesia (Skor Naik, Peringkat Turun)
36/37	15/ 15	88/90	Thailand (Skor Turun, Peringkat Turun)
38/35	11/ 18	76/101	Philippines (Skor Turun, Peringkat Turun)
35/35	16/ 18	95/101	Vietnam (Skor Naik, Peringkat Turun)
31/33	17/ 21	112/113	Laos (Skor Naik, Peringkat Naik) Myanmar (Skor Naik, Peringkat Naik)
21/30	21/23	139/123	Cambodia (Skor Turun, Peringkat Turun)
22/28	24/ 25	147/136	
21/21	25/28	150/156	

Sumber: Corruption Perception Index 2016. 0 artinya sangat korup, 100 artinya sangat bersih.
* tidak ada data.

Berdasarkan temuan dan rekomendasi utama Transparency International (TI) dalam Corruption Perception Index (CPI) 2016 yang diluncurkan secara global, Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2016 meningkat tipis satu poin sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Terhitung sejak 2012, skor CPI Indonesia meningkat lima poin dalam rentang waktu lima tahun. Peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 pada akhir 2016. Peningkatan skor CPI lambat karena pemberantasan korupsi selama ini hanya fokus pada sektor birokrasi saja. Reformasi birokrasi memang berkontribusi terhadap perbaikan integritas layanan publik dan menyumbang kenaikan skor CPI rata-rata 1 poin setiap tahun. Strategi pemberantasan korupsi nasional masih belum memberikan porsi besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis.⁴

⁴ Dalam kutipan Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia di artikel **Corruption Perceptions Index 2016 : Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta**, diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

Tahun 2016 lalu, skor CPI Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 1 poin dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tipis skor CPI Indonesia hanya mampu menyialip Thailand (35, turun) yang selalu berada di atas Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Kenaikan skor CPI ini belum mampu mengungguli Malaysia (49, turun), Brunei (58) dan Singapura (85, turun). Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Thailand (35, turun) dan Filipina (35, tetap), Vietnam (33, naik), dan Myanmar (28, naik), Kamboja (21, tetap)⁵.

Selain itu, dengan adanya kasus E-KTP yang baru-baru ini muncul dipermukaan menambah sederet panjang kasus korupsi di Indonesia sehingga mencoreng moralitas dari birokrasi pemerintahan Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Potensi kerugian negara pada proyek yang telah diusut sejak tahun 2011 lalu mencapai Rp. 2,3 triliun. Jika digunakan untuk ibu melahirkan, itu setara dengan 4 juta ibu melahirkan. Kalau digunakan untuk pembangunan rumah bagi buruh dan petani, itu sekitar 25.000 unit rumah kalau dianggap saja harganya Rp. 92 juta.⁶ Padahal berdasarkan Undang- Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

B. PERMASALAHAN

Ketika birokrasi yang telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat memperbaharui diri menjadi lebih baik, namun perubahan itu sejauh ini tidak jelas, Hal yang

tampak jelas ialah bahwa karakter birokrasi belum berubah.

Para birokrasi pada umumnya masih kurang peduli terhadap kepentingan dan nilai publik, lebih menempatkan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan publik,

⁵Transparency International Indonesia, edisi Rabu, 25 Januari 2017 : Corruption Perception Index 2016, Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta.

⁶Dalam kutipan Agus Sarwono, Peneliti Transparency International Indonesia di artikel Transparency International Indonesia, edisi minggu 19 Maret 2017 : Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP. Diakses tanggal 26 Maret 2017.

kurang profesional dan cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Citra negatif yang sudah lama terbentuk ini secara terus-menerus telah lama melekat pada diri birokrasi publik yang ada di Indonesia ini menyebabkan menurunnya kepercayaan public pada birokrasi di Indonesia. Fenomena ini tentu sangat memperburuk kondisi Negara Indonesia dan hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Pemerintah harus melakukan suatu hal untuk mengubahnya. Jika tidak, kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat akan terus memiliki jarak dalam pandangan masyarakat yang sudah tidak peduli lagi terhadap pemerintah yang diakibatkan buruknya birokrasi yang ada di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan latar belakang sebagai berikut :

1. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.
2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik.
3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan.
4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih rendah.
5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai masih rendah.

Agus Dwiyanto mengemukakan ada 5 indikator untuk mengukur kinerja birokrasi, yaitu :

1. Produktivitas.
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesien, tetapi juga efektivitas pelayanan.
2. Kualitas pelayanan.
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas.
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (levine, 1990)
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar pada kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat (Dwiyanto dalam Dwiyanto, 2006 : 50-51)

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi memanglah tidak mudah, berbagai hambatan dapat ditemui baik didalam (internal) maupun eksternal. Berikut ini beberapa cara untuk menghadapi hambatan yang ditemui dalam birokrasi pemerintahan Indonesia menurut penulis yakni ;

1. Meningkatkan Moralitas dan Motivasi SDM.

Mengenai masalah Sumber Daya Manusia (SDM), EE Mangindaan (Mantan Kemen PAN dan RB) mengatakan bahwa kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah hambatan untuk melakukan reformasi birokrasi seringkali justru datang dari dalam birokrasi itu sendiri (internal), baik karena lemahnya kemampuan atau rendahnya kemauan. Sebenarnya persoalan SDM juga terkait dengan: (1) system rekrutmen, (2) penempatan (*the right man in the right place*), dan (3) system insentif serta gaji. Sistem rekrutmen yang masih bernuansa KKN, maka tidak akan menghasilkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dan profesional.

Kolusi dan Nepotis menyebabkan para pengambil kebijakan menjadi dilemma dalam memutuskan SDM yang ideal, karena analisis jabatan tidak akan menjadi dasar pertimbangan. Keputusan yang diambil, biasanya bersifat politis. Misalnya rekrutmen pegawai dijadikan jatah bagi para pendukung kepala daerah terpilih atau hasil pengaruh para politisi di daerah (anggota DPRD). Demikian pula penempatan seseorang dalam jabatan tertentu. Dasar pertimbangan yang diambil bukan berdasarkan kompetensi. Analisis jabatan atau kinerja, tetapi seringkali bersifat politis untuk

menjaga kepentingan-kepentingan kekuasaan pimpinan. Sistem insentif dan gaji yang tidak memadai ikut berkontribusi terhadap jalannya reformasi birokrasi, karena insentif dan gaji dapat memotivasi birokrasi dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan kinerja dengan baik. Dengan insentif dan gaji yang tinggi akan memberikan stimulus birokrasi bekerja dengan baik dan diharapkan tidak terjadi korupsi. Meskipun hal ini tidak menjamin 100 % birokrasi akan bekerja dengan jujur, karena masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran. Sebagai contoh, dapat dikemukakan kasus Gayus Tambunan yang memanipulasi pajak dan merugikan negara, Proyek Hambalang yang melibatkan para pejabat birokrasi, dan kasus PON di Riau yang melibatkan kepala daerah serta masih banyak contoh kasus yang ditemui KPK.⁷ Untuk itu, Dwiyanto dalam Dwiyanto, (2016, hal : 222) merumuskan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk karakter aparatur birokrasi Indonesia melalui diskusi panjang LAN dengan banyak nara sumber, maka di sepakatilah ANEKA⁸ yakni :

- Akuntabilitas, setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada warga dan pemangku kepentingan.
- Nasionalisme, Semangat mencintai tanah air, persatuan dan kesatuan Indonesia yang diwujudkan dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas lainnya.
- Etika Kekuasaan, Kesadaran etis bahwa jabatan publik yang diemban memiliki wewenang tertentu, yang penggunaannya mempengaruhi kehidupan warga dan masyarakat luas
- Komitmen Mutu, Kepedulian untuk selalu memperbaiki kualitas kerja melalui pengembangan inovasi dan pembentukan kapasitas diri sebagai insane pembelajar.
- Antikorupsi, Kesadaran untuk bersih dan membersihkan lingkungan dan birokrasi dari berbagai bentuk tindakan korupsi.

2. Perlunya komitmen politik dari pimpinan eksekutif maupun legislatif

Salah satu syarat dalam penerapan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia adalah perlunya komitmen politik dari pimpinan eksekutif maupun legislative terutama kepala daerah di daerah masing-masing untuk mampu melakukan perubahan mendasar. Jika komitmen ini tidak di

⁷ Hanafie, Haniah. "Strategi Reformasi Birokrasi". Jurnal Fisip UIN Jakarta (Tidak diterbitkan)

⁸ Kata ANEKA sendiri dipilih untuk menggambarkan kesadaran pegawai birokrasi bahwa Indonesia ialah bangsa yang beraneka ragam dalam banyak aspek budaya, etnisitas, agama, tingkat kemajuan sosia lekonomi dan kesejarahannya.

utamakan, maka sangat sulit dicapai perubahan bagi pelayanan birokrasi. Karna, komitmen ini bukan hanya sebagai symbol demokrasi, melainkan sebagai wujud keseriusan birokrat dalam mengubah birokrasi kejalan yang benar. Komitmen elit inia kan melahirkan ruang-ruang penyerapan aspirasi baru baik dilingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislative. Hal ini sebagaimana dikatakan Prasojo, Maksu dan Kurniawan (2006: 175-176) dalam penelitian mereka di beberapa daerah bahwa salah satu factor pendukung keberhasilan reformasi birokrasi adalah komitmen dan *political will* kepala daerah. Komitmen elit ini menjadi sangat penting sebab, selama ini perubahan haruslah dimulai dari atas. Komitmen elit yang mau membuka ruang penyerapan aspirasi akan menambah kepercayaan public kepada birokrasi dan dewan perwakilan rakyat.

3. Revitalisasi Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi penting untuk dibangun dan dikembangkan agar mampu memberikan petunjuk, menginspirasi, dan mendorong perubahan menuju pada pencapaian visi dan misi birokrasinya. Budaya yang menghargai Integritas, kualitas dan kolegialitas sangat penting dilembagakan karna budaya menjadi fondasi yang diperlukan untuk membangun institusi.⁹ Budaya birokrasi di Indonesia yang merupakan penggabungan nilai-nilai tradisional dan modern tercermin secara nyata dalam perilaku birokrasinya. Oleh karenanya, birokrasi Indonesia lebih tercerminkan percampuran antara karakteristik birokrasi Weberian dengan karakteristik birokrasi yang berakar pada budaya lokal. Budaya seperti ini memberikan peluang pada munculnya sikap dan perilaku paternalistik yang merugikan masyarakat secara luas. Budaya Paternalistik ini menempatkan pimpinan sebagai sentral kehidupan dan kegiatan birokrasi serta bersifat cenderung semakin menguat dalam birokrasi Weberian yang sudah terlanjur mengakar dalam kehidupan birokrasi pemerintah.¹⁰ Selain itu, menurut Mas'ood

dalam Dwiyanto (2006, hal : 30) menyatakan bahwa factor budaya dalam masyarakat Indonesia umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada jabatan pemerintah. Tindakan tersebut bagi masyarakat Eropa atau Amerika dianggap sebagai tindakan korupsi, tetapi bagi masyarakat Asia seperti di Indonesia, Korea Selatan dan Thailand dianggap bukan merupakan tindak korupsi. Bahkan pada kultur Jawa, pemberian tersebut dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh bawahan (*kawula*) kepada rajanya (*Gusti*).

D. KESIMPULAN

Dalam upaya merubah birokrasi pemerintahan di Indonesia kearah yang lebih baik mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani masih memerlukan proses yang panjang. Pasalnya kebiasaan yang tidak berorientasi masyarakat dan perilaku korup dalam birokrasi telah terpupuk lama jauh berdasarkan sejarah panjang birokrasi di Indonesia, sehingga tidaklah mudah untuk mengubahnya dengan cepat. Upaya perubahan dan pembentukan nilai-nilai birokratisme baru lebih rasional, profesionalisme, pasti dan bertanggungjawab akhirnya terletak pada kemampuan dan kesungguhan pemerintah. Namun, reformasi birokrasi tidak hanya menitikberatkan pada gerak pemerintah aja, seluruh komponen masyarakat dan swasta juga dapat mendukung reformasi birokrasi ini sehingga *effective governance* akan cepat tercapai, bila semua pihak dapat turut andil berperan dalam mendukung pencapaian tersebut. Jika semua pihak dapat saling bergotong royong memajukan birokrasi di Indonesia seperti yang dicita-citakan maka terwujudnya Indonesia Baru yang bersih serta bermartabat dimata dunia akan tercapai sehingga akan memajukan bangsa Indonesia itu sendiri tentunya

⁹Dalam Dwiyanto, Agus. 2016. Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah : Catatan Kritis Seorang Akademisi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

¹⁰Dalam Dwiyanto, Agus. 2016. Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah : Catatan Kritis Seorang Akademisi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Birokrasi Weberian menempatkan kekuasaan sebagai milik elit bertemu dengan kuatnya nilai-nilai paternalisme, birokrasi cenderung menciptakan simbol, nilai dan bahasa yang melekat pada pemegang kekuasaan simbol, nilai, dan bahasa yang melekat pada pemegang kekuasaan dan jabatan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia : Seri Kajian Birokrasi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

_____. 2016. Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah : Catatan Kritis Seorang Akademisi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Poltak Sinambela, Lijan. 2011. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media

Zauhar, Soesilo. 2002. Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta : Bumi Aksara

Jurnal :

Agus Purwanto, Erwan. "Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru : Pendekatan Konseptual Administrasi Publik", Vol. 4, No. 2, tahun 2005 : hal. 110-121.

Muhtadi, Yudi. "Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Daya Saing Ekonomi di Era Globalisasi Menuju Indonesia Unggul". Jurnal Ilmiah Administrasi, Vol. 1, tahun 2015.

Hanafie, Haniah. "Strategi Reformasi Birokrasi". Jurnal Fisip UIN Jakarta (Tidak diterbitkan)

Jafar AW, Muhammad. "Reformasi Birokrasi Ditingkat Desa (Studi Komparasi Pelaksana Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik di Desa CadasariKecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). Jurnal Ilmiah Niagara, Vol. V, No. 4. Desember 2013.

Dwi Tanti, Errica, dkk. "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, hal. 16-21

Bahan Bacaan :

Transparency International Indonesia, edisi minggu 19 Maret 2017 : Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP. Diakses tanggal 26 Maret 2017.

Transparency International Indonesia, edisi Rabu, 25 Januari 2017 : Corruption Perception Index 2016, Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta.